

Beritasatu Photo/Uthman AR

Kenaikan Tarif Listrik

Petugas memperbaiki instalasi listrik di Bedahan, Sawangan, Depok, kemarin. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan listrik nonsubsidi di tahun 2022. Meski hingga saat ini kenaikan tarif listrik belum ditetapkan.

ESDM Siapkan Regulasi Carbon Capture Storage

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi tersebut yang akan mengatur masalah *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)*. Regulasi sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan *carbon capture* yang sangat ditunggu oleh para *stakeholder*. Regulasi ini masuk dalam prioritas untuk diselesaikan tahun 2022, sehingga dapat segera diimplementasikan.

Oleh **Rangga Prakoso**

Untuk menyiapkan regulasi tersebut, Ditjen Migas telah membentuk Tim Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Kegiatan CCS/CCUS dengan melibatkan stakeholder seperti SKK Migas, BPMA, CoE CCS/CCUS ITB, Lemigas Kementerian ESDM, IPA, Pertamina, BP, Medco, Repsol, Inpex, ENI, ExxonMobil ConocoPhillips dan khusus dari Aceh adalah PEMA.

“Tim ini telah bekerja secara intensif sejak pertengahan 2021 sampai dengan saat ini untuk menyusun draft Permen ESDM terkait Penyelenggaraan CCS/CCUS yang mencakup aspek teknis mulai dari CO2 Capture, Transportasi, Injeksi, Storage dan MRV, Aspek Ekonomi dan Monetisasi, serta aspek legal yang dibutuhkan dalam mendorong pengembangan CCS/CCUS di Indonesia,” papar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) demi memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, upaya mengurangi emisi menuju *Net Zero Emission (NZE)* tahun 2060 juga terus dilakukan. Untuk mencapai keseimbangan kedua hal tersebut, pemanfaatan teknologi pengurangan emisi seperti *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)* bisa menjadi solusi, mengingat CCUS mampu meningkatkan produksi migas melalui CO2-EOR atau EGR sekaligus mengurangi emisi gas rumah



Tutuka Ariadji

kaca (GRK) secara signifikan. “Banyak forum internasional yang membahas upaya mencapai NZE juga menjadikan CCS/CCUS sebagai *key technology* untuk mencapai target NZE tersebut. Sementara di level nasional, saat ini minat para *stakeholder* baik dari migas maupun industri lainnya untuk mengembangkan CCS/CCUS cukup banyak pada hampir seluruh area di Indonesia,” kata Tutuka. Minat *stakeholder* mengembangkan CCS/CCUS terlihat mulai dari Aceh hingga Papua, seperti Lapangan Gundih, Sukowati, Saka-kemang, East Kalimantan hingga rencana proyek CO2-EGR di Lapangan Tangguh. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid Hasyim menambahkan, keterlibatan *stakeholder* sejak awal

penyusunan Permen ini bertujuan agar pelaksanaannya nanti tidak mengalami kendala. “Proses harmonisasi juga kita harapkan berjalan lancar karena semua pihak telah kita libatkan sejak awal,” ujarnya.

Masukan-masukan yang disampaikan oleh stakeholder nantinya akan didalami dan dicermati oleh Tim Teknis dan Biro Hukum Kementerian ESDM. “Semoga dengan adanya aturan ini, penggunaan teknologi CCS/CCUS diharapkan tidak mengalami kendala karena sudah ditunggu-tunggu oleh industri lainnya, seperti pemanfaatan batu bara,” tambah Wakhid.

Rahmat Sule dari ITB mewakili Tim Penyusunan menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menurunkan emisi GRK, sektor energi dan sumber daya mineral memiliki porsi sekitar 314-446 juta ton CO2 yang akan dikurangi hingga tahun 2030. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk mewujudkan target tersebut, antara lain melalui penggunaan teknologi CCS/CCUS.

“Kita berusaha meregulasi semua aktivitas dalam CCS/CCUS ini. Pelaku industri juga kan perlu dilindungi ketika melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, regulasi ini sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penggunaan teknologi CCS/CCUS di Indonesia juga menghasilkan dampak keekonomian yang positif. Hal ini antara lain berdasarkan hasil penelitian di Lapangan Tangguh apabila proses injeksi dilakukan hingga tahun 2045. Apalagi jika CO2 yang tersimpan di subsurface bisa dimonetisasi. Lapangan Tangguh ditargetkan mulai menerapkan CCUS tahun 2026 dan potensi CO2 yang tersimpan sebanyak 25 juta ton selama 10 tahun.

in akan didapatkan desain dan spesifikasi kilang secara lengkap sebagai dasar untuk melanjutkan proyek,” jelas Kadek. (es)

Realisasi 62,77%, Proyek GRR Tuban Serap 1.220 Pekerja Lokal

JAKARTA – Proyek kilang GRR Tuban yang dikerjakan oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (Pertamina Rosneft) melibatkan pekerja lokal dimana angka serapan telah mencapai 1220 pekerja di area Tuban, selain optimalisasi serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kilang GRR Tuban diproyeksikan akan menjadi salah satu kilang terbesar Indonesia dan menghasilkan produk BBM berkualitas seperti Gasoline, Diesel, dan Avtur hingga 229 ribu barel per hari (bph).

Direktur Utama Pertamina Rosneft, Kadek Ambara Jaya menegaskan bahwa pihak perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat Tuban melalui proyek GRR Tuban. Kadek menambahkan, komitmen Pertamina Rosneft dalam memberdayakan tenaga kerja lokal di area Tuban telah dilakukan sejak tahap pembersihan lahan (*land clearing*).

“Total, ada 1220 pekerja lokal yang diberdayakan sejak tahapan *land clearing* I hingga IV. Tenaga lokal ini berasal dari desa-desa ring 1 di area GRR Tuban termasuk Wadung, Rawasan, Mentoso, Sunurgeng dan Kaliuntu,” imbuh Kadek.

Selain melakukan pemberdayaan tenaga lokal, Kadek memastikan proyek GRR Tuban telah dijalankan selaras dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan. “Selama tiga tahun dari 2019-2021, kontribusi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan GRR Tuban telah mencapai Rp 23 miliar. Salah satu bentuk program sosial yang kami canangkan adalah beasiswa D3 Politeknik Energi dan

Mineral (PEM) Akamigas Cepu bagi para siswa bertalenta di area Tuban. Tahun ini penerima beasiswa kami telah memasuki tahap akhir studinya. Artinya, program kami dirancang berkelanjutan dan menasar seluruh lapisan masyarakat,” jelas Kadek.

Adapun proyek GRR Tuban memiliki target serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 27,85%. Komponennya antara lain penyerapan tenaga kerja lokal saat proyek berlangsung, setelah proyek berlangsung, hingga barang dan jasa dalam negeri yang berkualitas. “Bahkan, proyek GRR Tuban akan turut serta menggunakan bahan baku lokal dalam proses konstruksinya. Untuk menjamin kualitas TKDN, kami menggandeng PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam melaksanakan vendor assessment proyek agar para vendor benar-benar memenuhi nilai TKDN dalam pengadaan barang yang akan diserap dalam konstruksi GRR Tuban,” imbuh Kadek.

On Track

Mengingat nilai strategis yang dimiliki Kilang GRR Tuban untuk menyokong ketahanan energi negeri, pihak Pertamina Rosneft berkomitmen untuk mengelola proyek ini secara *on track*. “Hingga akhir Desember 2021, progres proyek ini mencapai 62,77% dalam tahapan penyusunan desain (*Front-End Engineering Design/FEED*). Angka ini cukup jauh melampaui target awal yaitu sebesar 56,45%. Penyusunan desain teknis ini merupakan fase yang krusial dalam pembangunan kilang, karena dari FEED

Vale Menyongsong Masa Depan Cerah

Pemerintah telah bulat tekad dengan kebijakannya yang melarang ekspor mineral mentah (bijih), meski di depan mata menghadapi gugatan dari sejumlah negara, yang tengah berproses di World Trade Organization (WTO). Nikel menjadi salah satu komoditas mineral yang kini dilarang untuk diekspor.

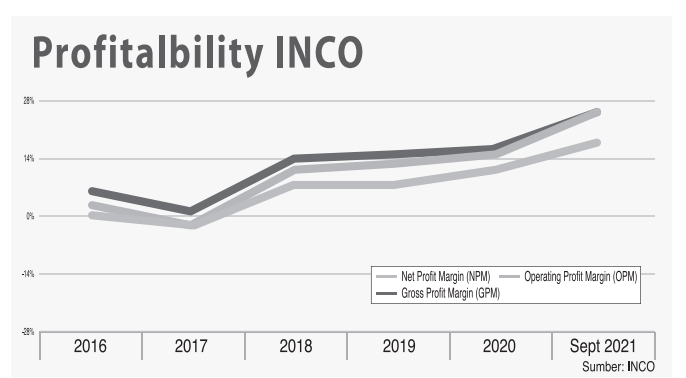
Alasan pemerintah tentu saja karena pemerintah ingin Indonesia mendapatkan nilai tambah yang maksimal dari komoditas mineral dengan mengolahnya di dalam negeri. “Jadi, sejak 2020 saya sampaikan bahwa pengiriman bahan mentah ini harus dihentikan dan harus diproduksi di negara kita, baik barang jadi maupun setengah jadi. Kami ingin punya nilai tambah yang dihadirkan di Tanah Air guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1) lalu.

Ketentuan tentang larangan ekspor bijih nikel yang dimaksud tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan aturan tersebut, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak dapat dikirim ke luar negeri.

Presiden pun sudah mengantongi data terkait ekspor komoditas nikel. Disebutkan bahwa tujuh tahun lalu, nikel saat diekspor dalam bentuk bahan mentah menghasilkan US\$1 miliar atau sekitar Rp14-15 triliun. Namun, ketika ekspor nikel dihentikan, pada akhir 2021 menghasilkan US\$ 20,8 miliar atau Rp 300 triliun. “Bayangkan itu baru nikel, belum bahan mentah lainnya, semisal emas, tembaga, dan lainnya,” kata Presiden.

Nikel memang merupakan salah satu komoditas mineral logam yang banyak dicari oleh sejumlah negara. Ditambah lagi adanya tren penggunaan mobil listrik, baik di Indonesia maupun dunia menjadikan komoditas itu menjadi kian strategis.

Mengutip data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia masih menunjukkan jumlah yang sangat menjanjikan. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono menyebut cadangan bijih nikel yang terkira adalah 3,74 miliar *metric ton* (wmt) dan jumlah



cadangan bijih nikel terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt, sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt, yang tersebar di 317 titik lokasi. Sementara jumlah cadangan logam nikel yang terkira sebanyak 40,99 juta ton, dengan cadangan terbukti sebanyak 16,11 juta ton. Dengan demikian, total cadangan nikel dalam jenis logam sebanyak 57,11 juta ton. Jumlah cadangan nikel Indonesia disebut merupakan 52% dari total cadangan dunia. Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki cadangan nikel dalam jumlah besar yakni Australia, Brazil, dan Rusia.

Steven Brown, konsultan independen di industri pertambangan, seperti dikutip *CNBC Indonesia* mengatakan bahwa permintaan nikel dunia ke depannya diperkirakan meningkat karena adanya transisi ke energi baru terbarukan (EBT), seperti peningkatan permintaan kendaraan listrik dan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang membutuhkan bahan baku nikel.

Sementara dari sisi pasokan, peningkatan produksi nikel dunia hanya terjadi di Indonesia. Sedangkan pasokan dari luar Indonesia mengalami tren penurunan. Karenanya, tak heran bila pasokan nikel dunia mengandalkan pasokan dari Indonesia. Dia menambahkan, dunia juga bergantung pada pasokan nikel Indonesia karena sejumlah proyek *smelter* nikel yang tengah dibangun. Hingga saat ini Indonesia memang masih menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia, disusul Filipina, Rusia, dan New Caledonia.

Masa Depan Vale

Mengutip data Kementerian ESDM, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menduduki peringkat teratas produsen nikel di Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan nikel yang melimpah, Vale pun tak malu-malu mengukui bahwa pihaknya tidak ingin menyia-nyiakannya kesempatan ini.

Diketahui, Vale sedang membangun dua pabrik baru yang terletak di Bahodopi dan Pomalaa. Pabrik Bahadopi diperuntukkan memproduksi nikel untuk kebutuhan baja. Di proyek ini Vale menggandeng dua korporasi asal China. Sementara untuk *smelter* Pomalaa, Vale menggandeng perusahaan asal Jepang.

Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Febrany Eddy mengatakan, produk nikel yang dihasilkan di *smelter* ini cocok digunakan sebagai komponen mobil listrik. Vale juga, katanya, tengah mempelajari studi-studi pengolahan nikel lainnya, seiring dengan melimpahnya cadangan nikel miliknya. Salah satunya adalah rencana memproduksi limonite di Sorowako, yang merupakan salah satu komponen utama pembuatan baterai listrik.

“Kami mendukung penuh larangan ekspor bijih nikel dan aturan untuk mengolah nikel di dalam negeri. Hal ini guna mendukung ketersediaan pasokan nikel ketika pengembangan kendaraan listrik mulai marak. Kebijakan ini akan membantu ketahanan nasional dari sisi ketersediaan bahan mentah,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Lucky Bayu Purnomo kepada *Investor Daily* mengatakan, penghentian ekspor mineral dan rencana pengembangan mobil listrik di Tanah Air merupakan sentimen positif untuk jangka panjang bagi perusahaan berkode saham INCO ini.

“Dalam jangka panjang, INCO cenderung menguat, oleh karena pertumbuhan nilai Aset yang terus menguat,” kata Lucky. Sentimen positif pertumbuhan aset tersebut, kata Lucky, disertai dengan kemampuan INCO untuk mengelola Rasio Hutang (DER).

“Untuk jangka panjang, tren harga saham INCO cenderung menguat dengan tren kenaikan margin perusahaan,” katanya. (Euis Rita Hartati)

Sambut 2022, PLN Kerjakan 34 Infrastruktur Ketenagalistrikan

JAKARTA – Setelah sukses merampungkan 50 proyek sepanjang 2021 lalu, di tahun ini PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) bersiap untuk melanjutkan pembangunan 34 proyek, yang 14 proyek di antaranya ditargetkan selesai tahun ini.

Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa – Bali, pembangunan transmisi Looping Jakarta menjadi salah satu fokus utama PLN UIP JBB di tahun 2022 ini. Sebanyak 6 proyek yang juga akan mendukung penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik ini meliputi SUTET 500 kV Duri Kosambi – Muara Karang, GISTET 500 kV Muara Karang, SUTET 500 kV Priok – Muara Tawar, Ext. GITET 500 kV Muara Tawar, SUTET 500

kV Muara Tawar – Bekasi, dan Ext. GITET 500 kV Bekasi.

Sementara itu, proyek besar pemerintah Kereta Cepat Indonesia – Cina (KCIC) juga akan mendapat dukungan listrik yang memadai dengan dibangunnya SKIT 150 kV Halim – Bekasi II dan SKIT 150 kV Halim – Poncol Bar II. Sedangkan proyek SKIT 150 kV Abadi Guna Papan – Mampang, SKIT 150 kV Cawang Baru – Abadi Guna Papan dan SKIT 150 kV Cawang Baru – Taman Rasuna akan memberikan suplai listrik terbaik ke area pemerintahan pusat.

“Ketiga proyek ini nantinya akan memberikan pasokan listrik ke area VVIP Indonesia,” kata General Manager PLN UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tak hanya itu, pembangunan juga akan berfokus untuk mendukung kebutuhan suplai Komsumen Tegangan Tinggi (KTT). “Proyek KTT kita di tahun ini ada 7, seluruhnya berfungsi memberikan suplai listrik ke industri – industri besar. Dengan semakin andalnya kelistrikan, maka operasional bisnis mereka akan semakin baik dan bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal,” papar Ratnasari.

Dari sisi pembangkit, pembangunan PLTU Lontar Extension yang berfungsi untuk menurunkan biaya pokok penyediaan listrik ini terus digenji penyelesaiannya. Sementara itu, Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan tenaga angin yaitu Pembangkit UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 (“Sukuk Mudharabah”)

Dengan rasa syukur **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)** memenuhi kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah yaitu **Pendapatan Bagi Hasil Ke-13** untuk periode Bulan **Desember 2021 s/d Februari 2022** dengan nisbah masing-masing sebesar 48,68% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun untuk Seri C, dan 51,32% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per tahun untuk Seri D. Sehingga pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-13 kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No	Sukuk Mudharabah	Nisbah	Ekuivalen Rate (per Tahun)	Pendapatan Bagi Hasil (Rp)
1	Seri C (5 tahun)	48,68%	9,25%	323.750.000
2	Seri D (7 tahun)	51,32%	9,75%	3.778.125.000

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-13 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah pada tanggal **08 Februari 2022** melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran.

Jakarta, 31 Januari 2022



Bank Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Manulife Investment Management

PENGUMUMAN PERUBAHAN TOLOK UKUR REKSA DANA SYARIAH MANULIFE DANA KAS SYARIAH DAN REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA

Bersama ini, kami PT Manulife Aset Manajer Investasi, selaku Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Manulife Dana Kas Syariah (MDKS) dan Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia (MSSI), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan nama bank lokal yang digunakan pada tolok ukur MDKS dan MSSI sebagai berikut:

Nama Reksa Dana	Semula	Menjadi
MDKS	Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal (BNI Syariah, BCA Syariah, BRI syariah), net setelah pajak.	Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal (Bank Syariah Indonesia, Bank CMB Bank Unit Syariah, Bank Maybank Indonesia Unit Syariah), net setelah pajak.
MSSI	Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal (BNI Syariah, BCA Syariah, BRI syariah) + 2%, Net setelah pajak.	Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal (Bank Syariah Indonesia, Bank CMB Niaga Unit Syariah, Bank Maybank Indonesia Unit Syariah) + 2%, Net setelah pajak.

Perubahan ini tidak mengubah strategi pengelolaan dan kinerja historis yang sudah tercatat sebelum tanggal efektif perubahan serta kepemilikan Unit Penyertaan pada masing-masing reksa dana tersebut.

Perubahan tolok ukur tersebut di atas akan berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2022. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di (021) 25552255.

Jakarta, 31 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia